

**REVITALISASI SISTEM EKONOMI PANCASILA  
PADA ERA GLOBALISASI**

**Prof. Dr. H. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd.**

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh***

Yang Saya Hormati:

Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya

Bapak / Ibu Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya

Bapak / Ibu Ketua dan Sekretaris Komisi Guru Besar Universitas Negeri Surabaya

Bapak / Ibu Pimpinan Tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya

Bapak / Ibu Dosen, Karyawan dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya, dan

Para Tamu Undangan dan Hadirin semua yang saya mulyakan.

Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, marilah kita memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita diizinkan berkumpul di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap dibidang Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya.

Selanjutnya, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya, pertama kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mengangkat saya sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dan kedua kepada Bapak Prof. Dr. Nur Hasan, M.Kes, selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dihadapan Sidang Senat Terbuka yang terhormat ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dan Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang telah menyempatkan diri menghadiri acara pengukuhan ini.

**Hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, dengan judul:

**“REVITALISASI SISTEM EKONOMI PANCASILA PADA ERA GLOABLISASI”**

**Hadirin yang saya hormati,**

Arus globalisasi dengan fenomena demokratisasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Bergulirnya era globalisasi yang didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menambah semakin cepat perkembangan kehidupan sosial ekonomi berikut dampak yang mengiringinya. Bahkan globalisasi dengan semangat demokratisasinya membuka lebar persaingan di berbagai kegiatan umat manusia di dunia. Persaingan antar bangsa yang tampak jelas adalah persaingan untuk mengejar kemakmuran dan kesejahteraan yang seringkali mengabaikan norma dan etika dalam berbisnis atau melakukan kegiatan ekonomi.

Kebebasan yang cenderung memunculkan persaingan dalam era globalisasi membawa dampak kesempatan yang luas bagi pemodal untuk berkiprah memainkan dominasi pada kegiatan ekonomi. Kondisi ini seringkali dikenal sebagai bentuk neoliberalisme yang memberi peluang luas untuk bersaing dalam dunia bisnis. Bahkan muncul tuduhan bahwa globalisasi adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh kaum kapitalis agar bebas menjajah bangsa lain dalam bentuk yang lain, yaitu dengan kemampuan daya saing yang mereka miliki bisa memainkan peran dan hegemoninya dalam kegiatan ekonomi. Globalisasi sengaja diciptakan oleh kaum kapitalis untuk menguasai persaingan dalam kegiatan ekonomi, karena mereka merasa siap untuk memasuki arena persaingan bebas di berbagai aspek kehidupan.

Globalisasi yang membuka lebar persaingan sehingga memberi angin segar bagi kaum kapitalis yang memiliki daya saing tinggi untuk memenangkan persaingan, bahkan seringkali dituding sebagai bentuk neo-liberalisme bagi suatu bangsa yang daya saingnya rendah. Kaum kapitalis yang rata-rata dari negara-negara kaya inilah

terutama yang menjadi sponsor globalisasi karena mereka telah siap untuk bersaing. Dengan semangat globalisasi yang mengusung kebebasan, akan memposisikan kaum kapitalis untuk memegang peran dalam percaturan ekonomi dunia. Dengan daya saing yang tinggi mereka akan mengendalikan kegiatan ekonomi bahkan politik dunia, sehingga praktik-praktik persaingan ini mirip dengan sebuah paham neoliberalisme. Kaum kapitalis dengan semangat globalisasi menyembunyikan agenda-agenda ekonomi neoliberal yang bertujuan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang seolah-olah demokratis, saling bekerjasama dan terbuka.

Globalisasi adalah sebuah proses sistematis untuk merombak struktur perekonomian negara-negara miskin, terutama berupa pengkerdilan peran negara dan peningkatan peranan pasar, sehingga memudahkan pengintegrasian perekonomian negara-negara miskin itu ke dalam genggaman kaum kapitalis dari negara-negara kaya. Dari pengertian umum tersebut dapat disaksikan bahwa bahaya globalisasi bagi negara-negara miskin pada dasarnya terletak pada melemahnya kemampuan pemerintah negara-negara miskin dalam melindungi kepentingan negara dan rakyatnya, dan meningkatnya ketergantungan perekonomian negara-negara miskin terhadap pemenuhan kepentingan para pemodal dari negara-negara kaya.

Dengan meningkatnya ketergantungan perekonomian negara-negara miskin terhadap pemenuhan kepentingan para pemodal negara-negara kaya, fungsi pemerintah dalam perekonomian negara-negara miskin cenderung berubah, yaitu dari melayani dan melindungi kepentingan rakyat menjadi melayani dan melindungi kepentingan para pemodal negara-negara kaya. Pada tingkat yang lebih ekstrim, globalisasi bermuara pada terjadinya pelebaran kesenjangan sosial dan ekonomi, dan meningkatnya dominasi para pemodal negara-negara kaya terhadap pemilikan faktor-faktor produksi di setiap negara miskin. Dengan demikian, bila secara internasional globalisasi menyebabkan semakin meningkatnya ketergantungan negara-negara miskin, secara domestik itu menjadi pemicu porak-porandanya fondasi integrasi sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Dengan bahaya seperti itu, mudah dimengerti bila Calvanagh (2002) lebih suka menyebut globalisasi sebagai imperialisme. Sebagaimana ditegaskan, di balik penyebaran globalisasi sesungguhnya bersemayam sebuah kepentingan kelas atas tertentu, yaitu kelas kapitalis internasional baru yang sedang berusaha

melebarkan pengaruh dan dominasi ekonomi mereka ke seluruh penjuru dunia.

Era globalisasi menumbuhkan kembali pandangan kaum Merkantilis pada abad ke-17 dan ke-18, sehingga menjadikan globalisasi ekonomi sebagai upaya untuk memperoleh surplus perdagangan dalam rangka memperkuat negaranya. Alexander Hamilton, tokoh Merkantilis dari Amerika Serikat pada tahun 1791 berkaitan dengan kebijakan proteksi AS di bidang industri menulis bahwa: tidak hanya kesejahteraan, tetapi ketergantungan negara miskin terhadap barang-barang industri manufaktur dan teknologi perlu dipertahankan. (Gilpin, 2008). Upaya globalisasi era kolonial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara yang sudah lebih dulu maju dengan mengeksploitasi negara atau daerah yang masih terbelakang. Globalisasi ekonomi yang sudah berakar sejak berabad-abad tersebut terus berevolusi. Komitmen yang mengarah pada globalisasi perdagangan dunia yang dimotori oleh Amerika Serikat tersebut pertama kali hanya diikuti oleh 23 negara. Evolusi globalisasi ekonomi ini kemudian berkembang sangat cepat sejak akhir 1980-an.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), yang menjamin demokrasi ekonomi tanpa mengangankan persaingan yang seluas-luasnya sebagaimana yang dikembangkan oleh paham neoliberalisme. Demokrasi ekonomi lebih mementingkan kerjasama dan persaudaraan sosial daripada persaingan. Ekonomi Pancasila menurut Hamid (2004) mengharapkan (a) Perekonomian digerakkan oleh stimulus ekonomi, sosial dan moral, (b) Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi, (c) Nasionalisme selalu menjawai kebijaksanaan ekonomi, dan (d) Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional, serta (e) Ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi.

Sistem Ekonomi Pancasila tidak liberal-kapitalistik, namun juga bukan sistem ekonomi yang etatistik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bagian penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yaitu: Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pantauan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas

7. Developing Characteristic of Entrepreneur through Social Studies to Foster the Spirit of Entrepreneurship Education International Conference Education Research (ICER) 2015 Khon Kaen University Thailand. Tgl. 11-12 September 2015. (Pemakalah, 2015)
8. Development of Competence Balance-Oriented Integrative Thematic Learning Tools to Foster Critical Thinking Skill and Positive Character of Elementary School Students. International Conference Education Research (ICER) Khon Kaen University Thailand. Tgl. 13-14 September 2014.
9. Seminar Antara bangsa: "Peningkatan Profesionalisme Pendidik Melalui Penulisan Makalah Akademik". Seminar Internasional dan Workshop di Universiti Sains Malaysia (USM) Penang, Malaysia Tgl 15-19 Desember 2010. Kompleks Tabung Haji, Bayan Lepas Pulau Pinang, Malaysia. (Pemakalah, 2010).

#### **Pengalaman Pengelolaan Jurnal Ilmiah**

1. Editorial Board pada beberapa Jurnal Internasional tidak bereputasi.
2. Editorial Board pada beberapa Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2, 3, 4 dan 5.
3. Reviewer pada beberapa Jurnal Internasional bereputasi.
4. Reviewer pada beberapa Jurnal Internasional tidak bereputasi.
5. Reviewer pada beberapa Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2, 3, 4, dan 5.

#### **Penghargaan**

1. Satya Lencana 20 tahun. (2008, Presiden RI).
2. Satya Lencana 30 tahun. (2017, Presiden RI).
3. Nominasi Dosen Berprestasi (Perwakilan Dosen FEB Unesa). (2015, Rektor Unesa).

20. Correlation Between Teacher Competency With Student Learning Results (Case Study In Junior High School Nurul Islam Lumajang District East Java). IOSR JRME. *Journal of Research in Education*. Vol 8 Issue 4 . Versi 2. 2019. Terindex NASA DRJI,dll. (Anggota, 2019)

#### **Publikasi di Jurnal Nasional**

1. Pengaruh Pengalaman Ekonomi, Kontrol Diri serta Pendapatan Siswa Terhadap Perilaku Ekonomi Siswa SMA di Kecamatan Pasir Belong Kabupaten Paser. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 6. No. 1, Tahun 2018. Sinta 3. (Anggota, 2018)
2. Penerapan Teori Belajar Sosial Berbasis Soft Skill dalam Pendidikan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 2. No. 2, Tahun 2014. Sinta 3. (Anggota, 2018)

#### **Pengalaman Seminar Internasional**

1. Influence of CTL Approach To Improve Critical Thinking Skills and Social Study Learning Outcomes In Primary Schools. 2nd International Conference on Education Innovation (ICEI 2018). Published: Atlantis Press. IOP Indexed.(Pemakalah)
2. How CPS version 2.2 Can improve students' activity and achievement in integrated learning towards the second grade students of primary school. 2nd International Conference on Education Innovation (ICEI 2017). Published: Atlantis Press. IOP Indexed. (Anggota, 2017).
3. SIM General Education for Educators Seminar. SIM University. Singapore, 13 October 2016.
4. Colloquium Result of Research from Universiti Technology Malaya Student. Universiti Technology Malaya. Johor Baru, 20 September 2016.
5. Teaching Strategies Workshop. Social Science Training Center Institute. Singapore, 14 January 2016.
6. The Creative Economic Development to Foster Competitiveness in ASEAN Economic Community. International Conference on Economic Education & Entrepreneurship 2016 Faculty of Economic, State University of Surabaya. Tgl. 29 Juli 2016. (Pemakalah, 2016)

kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Sistem ekonomi Pancasila ini sangat sulit untuk dikembangkan pada era globalisasi yang mengedepankan persaingan bebas. Bahkan tantangan ini menjadi semakin berat, karena ada kecenderungan berkembangnya semangat individualisme sebagai akibat merebaknya pengaruh paham kapitalisme-liberalisme (atau bahkan neoliberalisme). Dengan munculnya kelompok pengusaha nasional yang menganut paham kapitalisme global, rupanya muncul semangat 'keserakahan' baru yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan ekonomi rakyat.(Mubyarto, 2005).

Untuk mengendalikan kondisi ini, sistem perekonomian Pancasila perlu direkonstruksi dan didasarkan pada kebijakan sistem perekonomian yang berpihak pada rakyat. Perekonomian digerakkan oleh stimulus ekonomi, sosial dan moral yang beradab. Bangsa Indonesia perlu menumbuhkan semangat untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial ekonomi. Rasa nasionalisme selalu menjiwai para pengambil kebijakan ekonomi agar menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, perlu menumbuhkan kembali ajaran ekonomi koperasi yang merupakan sokoguru perekonomian nasional. Dalam perkembangan ekonomi, perlu ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi sehingga lebih mengutamakan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

#### **Hadirin yang saya hormati,**

#### **Perkembangan Perekonomian Era Globalisasi**

Globalisasi ekonomi yang sudah berlangsung berabad-abad yang lalu, didasari oleh kepentingan negara-negara yang sudah maju ekonominya untuk mencari kekayaan demi kemakmuran negaranya, tanpa peduli terhadap negara mitra atau koloninya. Bagi negara-negara maju tersebut yang penting adalah penumpukan kekayaan atau emas dan kesejahteraan mereka. Globalisasi ekonomi pada masa kolonialisme Eropa lima abad lalu bertujuan untuk mendapatkan kekayaan di belahan dunia yang sebelumnya tidak terjangkau. Cristobal Colon, yang kemudian dikenal dengan nama Christopher Columbus, dengan dukungan dana dari Raja dan Ratu Spanyol berlayar mengarungi lautan untuk menuju wilayah Asia yang diberitakan berlimpah dengan kekayaan alam dan emasnya. Upaya mencari wilayah baru untuk memperoleh kekayaan bagi

negara yang relatif kaya semacam ini terus berlanjut. Dalam catatan sejarah yang terkait dengan globalisasi lainnya, dapat dikemukakan upaya yang dilakukan juru bicara terkenal Kerajaan Inggris tahun 1890-an, Cecil Rhodes, yang menyatakan perlunya negara mendapatkan tanah yang baru, karena lahan (jajahan) yang baru tersebut bisa menguntungkan negerinya.(Elwood, 2001). Jadi upaya globalisasi era kolonial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara yang sudah lebih dulu maju dengan mengeksploitasi negara atau daerah yang masih terbelakang.

Globalisasi ekonomi yang sudah berakar sejak berabad-abad tersebut terus ber-evolusi. Titik yang signifikan terjadi tahun 1947 saat mulai berlakunya dan dilembagakannya Perjanjian Umum tentang Tariff dan Perdagangan atau GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Komitmen yang mengarah pada globalisasi perdagangan dunia yang dimotori oleh Amerika Serikat tersebut pertama kali hanya diikuti oleh 23 negara. Evolusi globalisasi ekonomi ini kemudian berkembang sangat cepat sejak akhir 1980-an. Melalui perundingan panjang yang dilakukan GATT selama 8 tahun, yang dikenal dengan Putaran Uruguay pada tahun 1995 berhasil memutuskan membentuk World Trade Organization (WTO). Keanggotaan WTO ini terus berkembang mencapai 148 negara sampai tahun 2005, dengan bidang cakupan yang lebih luas, yakni menyangkut liberalisasi lalu lintas barang dan jasa.

Semakin berkembangnya teori-teori yang berkaitan dengan integrasi ekonomi, liberalisasi perdagangan menjadi ujung tombak globalisasi ekonomi. Perkembangan perdagangan dunia semakin pesat sejak GATT tersebut. Lebih pesat lagi perkembangan ekonomi pada kisaran dua dasawarsa terakhir ini. Dilaksanakannya keputusan-keputusan dari Putaran Uruguay semakin mempercepat perdagangan dunia tersebut. Globalisasi, yang dalam perdagangan internasional menjadi liberalisasi perdagangan, telah menghapuskan berbagai hambatan perdagangan secara signifikan, baik itu hambatan yang berwujud tarif bea masuk maupun hambatan-hambatan bukan tarif, seperti pelarangan impor, kuota, lisensi impor, dan sebagainya. Dimasukkannya sektor jasa dalam liberalisasi ekonomi dunia itu, sebagai implementasi GATS (General Agreement on Trade and Services), semakin menyudutkan posisi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, yang umumnya sangat lemah dalam sektor jasa.

Secara makro-global peningkatan perdagangan bebas tersebut merefleksikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun

10. Capabilities Comparison of Surabaya and Malaysia Economic Teachers in Innovative Learning Model Application. *International Journal of Educational Research Review*. (IJERE) Vol 4 (4) Terindex: DOAJ, DergiPark, OpenAire, dll.
11. The Effect of Treffinger Learning Model on Students' Critical Thinking Skill. *International Journal of Educational Research Review*. (IJERE). Vol 4 (4). Terindex: DOAJ, DergiPark, OpenAire, dll. (Anggota, 2018)
12. Multicultural Education Based On Local Education In Elementary School. *International Journal of Educational Research Review*. (IJERE). Vol 4 (3). Terindex: DOAJ, DergiPark, OpenAire, dll. (Anggota, 2018)
13. Development of Quiz Card Media to Improve Reading Skills and Critical Thinking on Student. *International Journal of Educational Research Review*. (IJERE). Vol 4 (3). Terindex: DOAJ, DergiPark, OpenAire, dll. (Anggota, 2018)
14. Comparison Of Cooperative Learning Models With Inquiry on Student Learning Outcomes. *International Journal of Educational Research Review*. (IJERE) Vol 4 (3).Terindex: DOAJ, DergiPark, OpenAire, dll. (Anggota, 2017)
15. Comparison of Student Learning Outcomes Through Video Learning Media with Powerpoint. *International Journal of Educational Research Review*. (IJERE). Vol 4 (2). Terindex: DOAJ, DergiPark, OpenAire, dll. (Anggota, 2017)
16. Application of Cooperative Learning Jigsaw Type to Improve Learning Outcomes of Economic Introduction and Business. *International Journal of Educational Research Review*. (IJERE). Vol 4 (2). Terindex: DOAJ, DergiPark, OpenAire, dll. (Anggota, 2017)
17. Effect of Mobile Banking and Online Shopping on Consumer Behavior. *International Journal of Educational Research Review*. (IJERE). Vol 4 (2). Terindex: DOAJ, DergiPark, OpenAire, dll. (Anggota, 2017)
18. Easy Econometrics by Student Worksheet. *International Journal of Educational Research Review*. (IJERE). Vol 3 (3)Terindex: DOAJ, DergiPark, OpenAire, dll. (Anggota, 2017)
19. Analysis of Financial Ratio in the Financial Position Report PT Gudang Garam TBK as A Measuring To Determine Company . Stability. *IOSR-JEF. Journal Economic and Finance (JEF)*. Vol 9. Issues 6. Versi 4.Terindex: NASA, DRJI, dll. (Anggota, 2018)

2. Comparison of The Application of Problem Based Learning Learning Models with Jigsaw Learning Model Towards Learning Activity of Students of Sman 2 Sidoarjo. *Journal Economic and Finance (JEF)*. Vol 10.Issues 1. Versi 1. Terindex: NASA, CrossRef, Cabell's Directory, (Anggota, 2019)
3. The Effect of Discussion Methods And Power Point Media on The Results of Learning on The Economic Study of Gama Cendekia Vocational Business Surabaya. *Journal Economic and Finance (JEF)*. Vol 10.Issues 1. Versi 1.Terindex: NASA, CrossRef,. (Anggota, 2019)
4. Student Perception of School Cooperatives in Growing Entrepreneur Characters of Smk Patriot Peterongan Jombang. *Journal Economic and Finance (JEF)*. Vol 10. Issues 1. Versi 1.Terindex: NASA, CrossRef. (Anggota, 2019)
5. The Effect of Service Quality And Employee Performance on Nitrogen Customer Satisfaction in CV.Wira Sejahtera Abadi Surabaya Branch. IOSR. *Journal Economic and Finance (JEF)*. Vol 10. Issues 1. Versi 1.Terindex: NASA, CrossRef, Cabell's Directory, dll. (Anggota, 2019 )
6. The Creating of Halal Value Chains: A Theoretical Approach. IOSR. *Journal Economic and Finance (JEF)*. Vol 10. Issues 1. Versi 1. 9Terindex: NASA, CrossRef, dll. (Anggota, 2019)
7. The Influence of Perceptions of Students about the World of Work, Family and Self Regulation against the Interest of Continuing Education at the Education Faculty of Economics Commerce Unesa. IOSR JRME. *Journal of Research in Education*. Vol 9 Issue 1 . 2019. Terindex: NASA, CrossRef. Dll. (Anggota, 2019)
8. Analysis of Lifestyle Factors That Influence Individuals Following Community. JRME. *Journal of Research in Education*. Vol 9 Issue 1 . 2019. Terindex: NASA, CrossRef. Dll. (Anggota, 2019)
9. Implementation of Cooperative Learning Model in Numbered Heads Together for Improving 4<sup>th</sup> Grade Students Learning Achievement on Social Science. JRME. *Journal of Research in Education*. Vol 9 Issue 1 . 2019. Terindex: NASA, CrossRef. Dll. (Anggota, 2019)

kesimpulan tersebut dipertanyakan manakala dilihat siapa atau negara-negara mana yang perekonomiannya mengalami peningkatan pesat tersebut. Ekspansi perdagangan terutama terjadi di negara-negara maju membuat negara berkembang semakin tertinggal. Konsentrasi perdagangan dunia masih berpusat di negara-negara Utara seperti Amerika Utara dan Eropa Barat, sementara untuk negara Asia hanya terkonsentrasi pada Jepang dan Cina.

Globalisasi perdagangan bagi negara sedang berkembang juga telah memerosotkan nilai tukar ekspornya terhadap impor barang-barang manufaktur yang dibutuhkannya. Bahkan, kemerosotan nilai tukar ini cenderung semakin parah dan menyebabkan perpindahan sumber daya riil yang diakibatkan oleh hilangnya potensi pendapatan atas ekspornya sebagai akibat kemerosotan nilai tukar. Berdasarkan kenyataan demikian Stiglitz (2002) meminta agar pelaksanaan globalisasi, termasuk berbagai kesepakatan (agreement) mengenai perdagangan dikaji ulang dan dipertimbangkan kembali secara radikal.

Dalam perspektif teoritik, globalisasi ekonomi menjanjikan manfaat yang sangat menggiurkan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dunia. Dengan penghapusan berbagai rintangan dalam hubungan ekonomi internasional akan mendorong peningkatan efisiensi dan produksi barang dan jasa. Spesialisasi ekonomi terjadi. Perdagangan dan investasi meningkat, teknologi produksi berkembang, yang kesemuanya mengarah pada peningkatan output dunia, yang berarti kesejahteraan dunia secara total juga meningkat. Oleh karena itu, berbagai hambatan perdagangan, baik itu yang berupa tarif yang tinggi maupun yang bukan tarif harus diminimalkan, bahkan dihilangkan. Melalui WTO dan berbagai lembaga-lembaga internasional hal itu selalu menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Kebebasan ekonomi dunia dianggap sebagai the best solution theory untuk meningkatkan output dunia. Dalam terminologi ekonomi, kebebasan ekonomi tersebut akan mewujudkan apa yang disebut sebagai Optimalitas Pareto (Pareto Optimality).

Konsep teori itu sangat gencar dilancarkan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Oleh karena itu, tidak mengherankan pada masa itu arus pemikiran tentang globalisasi ekonomi mewarnai hampir seluruh dunia. Terminologi berkaitan dengan globalisasi ini, seperti negara tanpa batas, liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas, atau integrasi ekonomi global menjadi semacam dogma yang diyakini akan membawa dunia pada kemajuan ekonomi, menghapuskan

kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan antar negara. Upaya ke arah globalisasi ini sangat didukung negara-negara adikuasa ekonomi, yang memang pola perdagangannya sudah terbiasa dengan liberalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dalam skala terbatas (atau disebut regionalisasi ekonomi) yang sering dianggap sebagai kisah sukses adalah integrasi ekonomi negara-negara Eropa Barat yang kini tergabung dalam Uni Eropa. Oleh karena itu, banyak negara yang “berlatih” untuk mempersiapkan diri ke arah globalisasi ekonomi melalui integrasi ekonomi regional. Dalam kawasan Asia Pasifik di bentuk APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang dimotori negara-negara seperti Australia, Amerika, dan Kanada. Dalam skala yang lebih kecil juga dibentuk North American Free Trade Area (NAFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan sebagainya.

Berbagai perangkat organisasi ekonomi dunia itu diharapkan akan membantu percepatan pewujudan globalisasi untuk mengangkat kemakmuran dunia. Para pendukung globalisasi ekonomi sangat yakin bahwa globalisasi menjanjikan terjadinya peningkatan kemakmuran dunia dan kerja sama internasional. Oleh karena itu mereka menyatakan tidak diperbolehkan adanya rintangan yang dapat menghambat lalu lintas barang dan jasa serta modal (Gilpin, 2002). Padahal, pemikiran untuk meliberalisasikan perdagangan dunia tersebut mempunyai prasyarat bahwa pelaku-pelaku yang akan mengintegrasikan ekonominya harus mempunyai kekuatan seimbang.

Prasyarat kondisi inilah yang tidak terpenuhi, kekuatan ekonomi antar negara masih sangat timpang, sehingga praktik globalisasi ekonomi belum bisa dilakukan. Kalaupun ingin dilaksanakan hal ini terbatas pada negara-negara yang relatif seimbang, yang biasanya terbatas pada kawasan tertentu, yang dalam konsep teori disebut sebagai regional economic integration. Perserikatan kegiatan ekonomi regional seperti pembentukan ikatan perekonomian kawasan perlu dirintis terlebih dahulu sebelum memasuki percaturan liberalisasi ekonomi global.

**Hadirin yang saya hormati,**

### **Kapitalisme dalam Era Globalisasi Ekonomi**

Globalisasi pada hakekatnya merupakan paham liberalisme baru yang menggerakkan mekanisme pasar bebas. Globalisasi membuka lebar transparansi perdagangan yang mengabaikan upaya perwujudan keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan mondial. Swasono (2005)

14. The Effects of Size, Leverage, Profitability, Ownership Concentration and Investment Opportunities Toward Corporate Governance Quality of Listed Companies in Indonesia Stock Exchanges. *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Volume 14 no. 1 th 2016. Indexed: SCOPUS, Q4. (Anggota dan corresponding).
15. Developing an Quartet Card Game as an Evaluation of Economics Learning for Senior High School. *International Journal of Control Theory and Applications*. Volume 8 no. 4 th 2015. Indexed: SCOPUS, Q1. (Anggota dan Coresponding).
16. Industry Support and social Economic of Community Education. *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Volume 13 no. 9 th 2015. Indexed: SCOPUS, Q4. (Anggota dan corresponding)
17. Revitalization Pancasila Economic System in the Gloablization Era. *International Journal of Economic Finance Issues*. Volume 5 no. 4 th 2015. Indexed: SCOPUS, Q3. (Mandiri dan coresponding).
18. Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economic Finance Issues*. Volume 5 no. 3 th 2015. Indexed: SCOPUS, Q3. (Anggota dan corresponding),
19. Learning Innovation for Macro- economic Courses in Macro Education. *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Q4 Volume 13 no. 4 th 2015. Indexed: SCOPUS, (Mandiri dan Coresponding).
20. Ceative Thinking Development to Foster Economic Creative: Evidence of State University of Surabaya. *International Review Marketing Management*. Volume 5 no. 3 th 2015. Indexed: SCOPUS, Q4. (Mandiri dan corresponding)

### **Publikasi di Jurnal Internasional Tidak Bereputasi**

1. The Effect of Focus Group Discussion (FGD) Toward Professional of Teacher Economics Development In Vocational School In Surabaya. *International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS)* – Volume 7 Issue 9 September 2020. (Anggota dan corresponding) (Anggota dan corresponding, 2020)

5. Entrepreneurship and Competitiveness Development to Foster Businesses online Activities by online: Empirical Studies in University State of Negeri Surabaya. *International Journal Economic Research*. Volume 14 no.4 th 2017. Indexed: SCOPUS, Q3. (Ketua dan corresponding)
6. Self Efficacy in Accounting Computer Application. *International Journal of Control Theory and Applications*. Volume 10 no.11 th 2017. Indexed: SCOPUS, Q1. (Anggota dan corresponding)
7. Income Disparity in Gerbangkertosusila Area of East Java Indonesia. *International Journal of Economic Finance Issues*. Volume 7 no. 1 th 2017. Indexed: SCOPUS, Q3. (Anggota dan corresponding)
8. Need Analysis Integrative Collaborative Learning In Indonesian Education Course. *International Journal MAN in INDIA*. Volume 96 (11). 2016.Indexed: SCOPUS, Q3. (Anggota dan corresponding).
9. Analysis of the Potential Economic Sector In The Southern Of East Java Indonesia. *International Journal of Economic Research*. Volume 13 no. 7 th 2016. Indexed: SCOPUS, Q3. (Anggota dan corresponding)
10. Competition Intensity, Uncertainty Environmental on the use of Information Technology and its Impact on Business Performance Small and Medium Enterprises. *International Review Marketing Management*. Volume 6 no. 4 th 2016. Indexed: SCOPUS, Q4. (Anggota dan corresponding)
11. The Meanings of Performative Speech and its Nonverbal Element at Elementary School.. *MAN in INDIA*. Volume 96 no. 9 th 2016. Indexed: SCOPUS, Q3. (Anggota dan corresponding)
12. Education inequality effect on poverty and economic growth: Empirical study in Province of East Java. *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Volume 14 no. 6 th 2016. Indexed: SCOPUS, Q4. (anggota dan corresponding).
13. The Application of Authentic Assessment in Integrated Tematic Teaching and Learning Process in Elementary School Level.. *International Journal of Control Theory and Applications*. Volume 8 no. 4 th 2015. Indexed: SCOPUS, Q1. (Anggota dan corresponding)

melihat bahwa secara empirik dan teoritik, era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang terjadi saat ini telah direncanakan secara sistemik oleh negara-negara kaya bersama kapitalisme global, yang menggunakan kekuatannya sendiri atau melalui lembaga-lembaga ekonomi-keuangan global yang berada di bawah pengaruhnya. Bahkan Mubyarto (2002) lebih tajam mengatakan bahwa globalisasi ekonomi bersifat serakah, imperialisme, dan sangat merugikan perekonomian negara-negara berkembang.

Untuk mengintegrasikan perekonomian global itu, melalui lembaga-lembaga ekonomi-keuangan dunia, dibuatlah aturan yang seragam, norma-norma yang standar, hukum ekonomi yang baku, dan berbagai ketentuan umum yang terkait dengan hubungan ekonomi internasional. Berbagai ketentuan itu umumnya diadopsi dari apa yang sudah berlaku dan menjadi kebiasaan di negara-negara industri yang berbasis ideologi ekonomi liberal-kapitalis. Melalui lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional, disusun berbagai kesepakatan global yang tidak selalu cocok dan menguntungkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini kemudian melahirkan kecurigaan terhadap adanya kepentingan yang tertentu dan pemaksaan kehendak untuk mewujudkan globalisasi ekonomi. Arah globalisasi ekonomi ternyata tidak banyak berubah sejak lima abad lalu sampai sekarang, yaitu menjadi alat kepentingan negara-negara adikuasa ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari menyatunya ekonomi dunia tersebut.

Kebijakan yang diterapkan di negara-negara maju tersebut acapkali bertentangan dengan prinsip globalisasi yang dikembangkannya. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat yang sangat kokoh melindungi para petani dan peternaknya dengan kebijakan subsidi yang sangat besar bertujuan untuk mengkerdilkan peran pemerintah dalam perekonomian. Meningkatnya pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto di negara-negara industri dapat ditafsirkan sebagai proses sistematis untuk merombak struktur perekonomian negara-negara miskin, dalam bentuk pengkerdilan peran negara dan peningkatan peranan pasar sehingga memudahkan pengintegrasian serta pengendalian perekonomian negara-negara miskin tersebut dibawah penguasaan pemodal negara-negara kaya (Baswir, 2005). Forum Globalisasi Internasional (1999), telah menyusun beberapa agenda yang mendesak untuk dilakukan dalam rangka internasionalisasi kegiatan, antara lain: pertama, pembentukan lembaga-lembaga internasional baru untuk: (1)

mencegah penularan penyakit, konflik, dan perusakan lingkungan internasional; dan (2) menetapkan norma internasional mengenai hak-hak dan standar-standar yang sebagian besar akan diterapkan pada tingkat nasional. Kedua, penataan ulang (reformasi) tata keuangan internasional. Ketiga, penataan ulang tata kelembagaan Bank Dunia dan bank-bank regional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), yang memiliki fungsi sejenis. Dan keempat, penataan ulang organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Globalisasi ekonomi yang sudah berlangsung berabad-abad yang lalu, didasari oleh kepentingan negara-negara yang sudah maju ekonominya untuk mencari kekayaan demi kemakmuran negaranya, tanpa terlalu peduli terhadap negara mitra atau koloninya. Bagi negara-negara maju tersebut yang penting adalah penumpukan kekayaan atau emas dan kesejahteraan mereka. Globalisasi ekonomi pada masa kolonialisme Eropa lima abad lalu bertujuan untuk mendapatkan kekayaan di belahan dunia yang sebelumnya tidak terjangkau. Cristobal Colon, yang kemudian dikenal dengan nama Christopher Columbus, dengan dukungan dana dari Raja dan Ratu Spanyol berlayar mengarungi lautan untuk menuju wilayah Asia yang diberitakan berlimpah dengan kekayaan alam dan emasnya. Upaya mencari wilayah baru untuk memperoleh kekayaan bagi negara yang relatif kaya semacam ini terus berlanjut. Jadi upaya globalisasi era kolonial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara yang sudah lebih dulu maju dengan mengeksploitasi negara atau daerah yang masih terbelakang.

Globalisasi perdagangan bagi negara sedang berkembang juga telah memerosotkan nilai tukar ekspornya terhadap impor barang-barang manufaktur yang dibutuhkannya. Bahkan, kemerosotan nilai tukar ini cenderung semakin parah dan menyebabkan perpindahan sumber daya riil yang diakibatkan oleh hilangnya potensi pendapatan atas ekspornya sebagai akibat kemerosotan nilai tukar. Berdasarkan kenyataan demikian Stiglitz (2002) meminta agar pelaksanaan globalisasi, termasuk berbagai kesepakatan (agreement) mengenai perdagangan dikaji ulang dan dipertimbangkan kembali secara radikal.

Globalisasi ekonomi secara teori bisa meningkatkan intensitas dan aktifitas kegiatan ekonomi dunia. Peningkatan aktifitas kegiatan ekonomi akan membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Dengan penghapusan berbagai rintangan dalam hubungan ekonomi internasional akan mendorong peningkatan

9. Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas pada guru-guru SD di kabupaten Banyuwangi. (2016)
10. TIM Juri Guru Berprestasi Jawa Timur. (2016)

#### **Pengalaman Menulis Buku**

1. Konsep dan Teori Ilmu-Ilmu Sosial. (Ketua, 2011)
2. Modul PLPG untuk Mata Pelajaran IPS di Sekolah Dasar. (Mandiri, 2011)
3. Modul PLPG untuk Mata Pelajaran PKn di Sekolah Dasar. (Mandiri, 2011)
4. Bahan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. (Mandiri, 2009)
5. Pedoman Pelaksanaan AA Pekerti Dosen-dosen Unesa. (Anggota, 2016)
6. Buku Ajar Pengantar Ekonomi Makro (Anggota, 2022)
7. Buku Ajar Kajian Ekonomi Islam (Syariah) (Anggota, 2022)
8. Buku Ajar Teori Ekonomi Mikro Dengan Pendekatan Studi Kasus (Anggota, 2021)

#### **Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi**

1. Can funding decentralization influence the Local Economic Growth?. *Iranian Economic Review*. Volume 26, issues 2, 2022. Publisher University Teheran. Scopus indexed. Q3. IF 0.23.(Ketua dan Coresponding)
2. Regional Autonomy to Foster Economic Growth and welfare Society. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Issue* 13. October, 2020. Publisher Primose Hall Publishing. Scopus indexed. Q2. IF 0.28. (Ketua dan Coresponding)
3. Implementation of Partnership Program in Human Resources Development and Business for Small Entrepreneurs. *Jurnal Internasional: International Journal of Economic Research*. Volume 14 no.10. th 2017. Indexed: SCOPUS, Q3 (Anggota dan corresponding)
4. Influences of Intellectual Property and Capital to the Performance of the Corporate Image Award Winning Companies in Indonesia.l: *International Journal of Economic Finance Issues*. Volume 7 no. 4 th 2017. Indexed: SCOPUS, Q3.(Anggota dan Coresponding).

11. Pengaruh Kemampuan Guru Ekonomi dan Pengalaman Akademik Terhadap Hasil Belajar Siswa di Kota Surabaya. (Ketua, 2017)
12. Pengembangan Lembar Kegiatan Mahasiswa Berbasis Sainifik untuk Meningkatkan Keterampilan Penyelesaian Masalah Siswa SD Kabupten Aceh Besar. Tahun Ke 1. (Anggota, 2017. Pkpt)
13. Analisis Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Lulusan Pelatihan AA Pekerti Unesa 2014- 2017. (Ketua, 2017)
14. Pengembangan Lembar Kegiatan Mahasiswa Berbasis Sainifik Untuk Meningkatkan Keterampilan Penyelesaian Masalah Siswa SD Kabupten Aceh Besar. Tahun Ke 2. (Anggota, 2018. PKPT)
15. Pendampingan Pengelolaan Jurnal dan Manajemen Redaksi Jurnal Pembelajaran IPS Di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. (Anggota, 2016)
16. Penanaman Nilai-nilai Pancasila dalam Konstruksi Pembelajaran Kewirausahaan di Unesa. (Anggota, 2016).

#### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Aksi Kepedulian Terhadap Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19. (Kebijakan FEB, 2020)
2. Pelatihan Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan pada Guru SMA dan SMK di Kabupaten Magetan. (Kebijakan Pascasarjana, 2019)
3. Penyegaran Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Media Evaluasi Berbasis IT dengan Berbantuan *Software Lectora Inspire*. (Kebijakan FEB, 2019)
4. Pelatihan PEKERTI-AA pada dosen- dosen UNESA, dengan materi: Penelitian Tindakan Kelas dan *Lesson Study*. (2018)
5. Pelatihan PEKERTI-AA pada dosen- dosen AAL, dengan materi: Penelitian Tindakan Kelas dan *Lesson Study*. (2018)
6. Pelatihan PEKERTI-AA pada dosen- dosen STTAL, dengan materi: Penelitian Tindakan Kelas dan *Lesson Study*. (2018)
7. Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas pada guru-guru SMA di kabupaten Sidoarjo. (2017)
8. Pelatihan Penyusunan proposal Penelitian Tindakan kelas pada guru-guru SMP di Surabaya. (2017)

efisiensi dan produksi barang dan jasa. Globalisasi ekonomi akan meningkatkan lalu lintas perdagangan dan investasi antarnegara, teknologi produksi berkembang mengarah pada peningkatan output dunia, yang secara umum akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Oleh karena itu, berbagai hambatan perdagangan, baik itu yang berupa tarif yang tinggi maupun yang bukan tarif harus diminimalkan, bahkan bila perlu dihilangkan. Kebijakan meminimalisir hambatan perlu dilaksanakan oleh berbagai lembaga-lembaga ekonomi internasional. Kebebasan ekonomi dunia dianggap sebagai upaya yang efektif untuk meningkatkan output dunia, yang berujung pada kesejahteraan umat dunia. Kebebasan ekonomi tersebut akan mewujudkan Optimalisasi Produk. Semangat optimalisasi produk dan distribusinya terus dikembangkan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Konsep pemikiran tentang globalisasi ekonomi terus berkembang hampir ke seluruh dunia. Liberalisasi ekonomi berdampak pada kondisi yang seolah-olah negara tanpa batas (borderless) fisik yang jelas, perdagangan bebas melanda ke berbagai sektor komoditi. Integrasi ekonomi global diyakini akan membawa dunia pada kemajuan ekonomi, menghapuskan kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan antarnegara kaya dan miskin.

Kebijakan ke arah globalisasi ini sangat didukung negara-negara adikuasa ekonomi, yang memang pola perdagangannya sudah terbiasa dengan liberalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dalam skala kawasan (regionalisasi ekonomi) yang sering dianggap sebagai kisah sukses adalah integrasi ekonomi negara-negara Eropa Barat yang kini tergabung dalam Uni Eropa (Wayne, 2001). Kisah sukses tersebut menjadi rujukan bagi negara-negara kawasan lain, sehingga banyak negara kawasan “berlatih” untuk mempersiapkan diri ke arah globalisasi ekonomi melalui integrasi ekonomi regional. Dalam kawasan Asia Pasifik di bentuk APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang dimotori negara-negara seperti Australia, Amerika, dan Kanada. Dalam skala yang lebih kecil juga dibentuk North American Free Trade Area (NAFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan sebagainya.

Dalam langkah berikutnya, berbagai perangkat organisasi ekonomi dunia yang dibentuk dengan harapan akan membantu percepatan pewujudan globalisasi ekonomi untuk mengangkat kemakmuran dunia. Para pendukung globalisasi ekonomi sangat yakin bahwa globalisasi menjanjikan terjadinya peningkatan

kemakmuran dunia dan kerja sama internasional. Berbagai rintangan yang dapat menghambat lalu lintas barang, jasa, dan kapital perlu dihilangkan (Gilpin, 2002: 293). Padahal, pemikiran untuk meliberalisasikan perdagangan dunia tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, terutama bagi negara-negara yang belum siap untuk bersaing atau memiliki daya saing yang rendah. Liberalisasi yang hakikatnya persaingan bebas tentu mensyaratkan kualitas yang seimbang bagi peserta persaingan. Apabila kualitas dan kekuatan modal tidak seimbang, bisa dipastikan persaingan akan dimenangkan oleh yang kuat daya saingnya. Faktanya kondisi kekuatan ekonomi antarnegara masih timpang, sehingga apabila akan bersaing tentu akan tidak seimbang. Liberalisasi dalam globalisasi ekonomi hanya akan membawa negara-negara maju menuju kemenangan dalam persaingan. Kalaupun integrasi ekonomi perlu dilaksanakan, perlu dibatasi pada kawasan-kawasan tertentu yang kekuatannya relatif seimbang. Teori regional economic integration, perlu lebih memperoleh prioritas pengembangannya melalui kerjasama kawasan. (David, 2005)

Dalam perspektif empirik, globalisasi ekonomi telah menjadi alat bagi negara maju untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan ekonomis dari negara-negara yang sedang berkembang. Padahal dari perspektif teoritik globalisasi ekonomi sebetulnya belum bisa diterapkan, karena masih timpangnya kekuatan-kekuatan ekonomi negara-negara di dunia ini. Oleh karena itu semestinya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi belum bisa dilakukan secara menyeluruh, melainkan harus bertahap dimulai dari kawasan regional tertentu yang sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing negara. (Rudrik, 2002). Kondisi ini harus menjadi catatan penting bagi negara-negara berkembang untuk mengantisipasi kekurangan dan kesiapannya dalam bersaing untuk menghadapi globalisasi ekonomi.

### Hadirin yang saya hormati,

#### Sistem Ekonomi Pancasila

Prinsip dasar dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), penerapannya dilandasi oleh filosofis Pancasila dan konstitusional UUD 1945. Nilai dan norma yang terkandung dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan bagi pengembangan sistem perekonomian, yang pada hakekatnya untuk mewujudkan

6. Tahun 1999-2003 : Ketua Program Studi PGSD FIP Unesa
7. Tahun 2005-2009 : Staf Alhi UPT P4 Unesa
8. Tahun 2009-2012 : Anggota Senat FIP Unesa
9. Tahun 2012-2015 : Anggota Senat Universitas Negeri Surabaya
10. Tahun 2014-2017 : Sekretaris Prodi S2 Pendidikan Dasar Pascasarjana Unesa.
11. Tahun 2017-2019 : Sekretaris P3AI LP3M Unesa

#### Pengalaman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (2016-2022)

1. Pengaruh Covid 19 Terhadap Daya Beli, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia (Ketua, 2022)
2. Pengembangan Buku Ajar Pengantar Ekonomi Makro (Anggota, 2022)
3. Pengembangan Buku Ajar Kajian Ekonomi Islam (Syariah) untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Program Studi S2 Pendidikan Ekonom. (Anggota, 2021)
4. Analisis Pembelajaran E-Learning Terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Ekonomi Sumber Daya pada Masa Pandemi Covid-19 (Anggota, 2021)
5. Pengembangan Model Pemberdayaan Entrepreneurship untuk Mengatasi Dampak Pandemic Covid-19 di Indonesia. (Ketua, 2020)
6. Analisis Gaya Belajar dan Literasi Visual Mahasiswa Terhadap Hasil Pembelajaran Ekonomi Mikro. (Anggota, 2019)
7. Pengembangan Buku Ajar Pengetahuan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial Berbasis Problem Base Learning (PBL) untuk Mengoptimalkan Matakuliah Konsep Dasar IPS Program Studi S2 Pendidikan Dasar. (Anggota, 2019)
8. Komparasi Kemampuan Guru Ekonomi Surabaya dan Malaysia dalam Penerapan Model Pembelajaran Inovatif. (Anggota, 2019)
9. Pengaruh Focus Group Discussion (FGD) Terhadap Pengembangan Profesi Guru Ekonomi di SMK di Kota Surabaya. (Anggota, 2019)
10. Pengembangan Lembar Kerja Mahasiswa untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa dalam Matakuliah Ekonometri. (Anggota, 2017)

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap (dengan gelar) : Prof. Dr. Drs. H. Waspodo Tjipto  
Subroto, M.Pd  
NIP : 195810181986031005  
NIDN : 0018115803  
Tempat dan Tanggal lahir : Madiun, 18 Oktober 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pangkat / Golongan : Pembina Utama muda / IV c  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Istri : Lusiana, Am.Pd  
Anak : 1. Dokter Yunita Puspasari  
2. Kartika Fitriana, SE, MM  
Alamat Rumah : Jalan Bratang Binangun II / 24  
Surabaya  
Telpon : 081333213333, 081358851118  
Email : waspodosubroto@unesa.ac.id

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Klegen Kota Madiun (1966-1971).
2. SMEP Negeri Kota Madiun (1971-1974).
3. SMEA Negeri Pembina Kota Madiun (1974-1977).
4. S1. IKIP Yogyakarta (Sekarang Universitas Negeri Yogyakarta), Jurusan PPKn (1979-1985).
5. S2. IKIP Bandung (Sekarang UPI), Program Studi: IPS SD (1995-1997).
6. S3. Universitas Brawijaya, Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (2003-2008).

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Tahun 1986-1988 : Guru SPG Negeri Sumenep
2. Tahun 1988-1989 : Guru SPG Negeri 1 Surabaya
3. Tahun 1990-2014 : Dosen PGSD FIP Unesa
4. Tahun 2014-sekarang : Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi FEB Unesa.
5. Tahun 1997-1999 : Sekretaris UPP 1 PGSD FIP Unesa, Jalan Teratai Surabaya

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut bisa terwujud apabila kebijakan ekonomi berpihak pada rakyat banyak, artinya ekonomi kerakyatan perlu dikedepankan sebagai dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demikian juga prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang secara konstitusional telah tertuang dalam UUD 1945, yaitu:

A. Pasal 23 : menegaskan bahwa hak-hak DPR antara lain :

- 1) Menyetujui/ menolak RAPBN dengan UU
- 2) Menetapkan pajak dengan UU
- 3) Menetapkan macam dan nilai Mata uang dengan UU
- 4) Memeriksa pertanggung jawaban keuangan negara (laporan BPK) dengan UU.

B. Pasal 27: Menegaskan bahwa tiapt-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

C. Pasal 33: Antara lain menegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan

D. Pasal 34: Faktir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

Bahkan secara rinci di dalam pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama beraskan kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikelola negara, (3) bumi dan air serta kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara, serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, (4) sektor swasta nasional dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan ekonomi kerakyatan digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral bangsa, sehingga ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. Nasionalisme selalu menjiwai kebijakan dan pelaksanaan sistem perekonomian.

Koperasi yang bercirikan asas kekeluargaan merupakan sokoguru perekonomian nasional. Ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijakan ekonomi. Sehingga sistem ekonomi Pancasila tidak bersifat liberal-kapitalistik, juga bukan menganut sistem ekonomi yang etatistik. Meskipun demikian sistem mekanisme pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian (Mubyarto, 2002).

Sistem perekonomian yang khas Indonesia sebaiknya berpegang pada pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila. Dari sila-sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila yang paling relevan untuk mengembangkan sistem perekonomian. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung dua makna:

1. Prinsip pembagian pendapatan yang adil, yang tidak mendasarkan pada free fight liberalisme.
2. Prinsip demokrasi ekonomi, yaitu diatur dalam UUD 1945 pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34.

Berdasarkan konstitusi negara, sistem ekonomi Pancasila lebih berpihak kepada rakyat sehingga berbagai kebijakan ekonomi negara harus menuju ke arah perwujudan keadilan sosial dengan menerapkan ekonomi kerakyatan yang berazas kekeluargaan. Sistem Ekonomi Pancasila lebih mengutamakan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia, tetapi tetap menjamin demokrasi ekonomi dan melindungi hak-ekonomi atau hak milik seseorang. Walaupun mengutamakan kepentingan bersama, tetapi hak-hak ekonomi individu warga negara Indonesia tetap dijamin dan dilindungi sehingga membuat kegiatan ekonomi lebih kondusif dalam meningkatkan aktifitas bisnis untuk mencapai kesejahteraan bersama.

**Hadirin yang saya hormati,**

### **Ekonomi Pancasila Dalam Era Globalisasi**

Globalisasi ekonomi menuju ke arah liberalisasi ekonomi yang sarat dengan persaingan bebas di berbagai sektor produksi barang maupun jasa. Dalam persaingan bebas ini kapitalisme global menjadi panglima dan pengendali arah perekonomian dunia. Kaum kapitalis, dengan modal teknologi yang relatif canggih dan dukungan moneter yang mantab serta semangat bersaing yang lebih kompetitif, sehingga memposisikan mereka sebagai pengendali ekonomi global. Praktik globalisasi ekonomi yang melahirkan hegemoni negara maju kepada negara berkembang sangat merugikan negara yang kurang siap dalam bersaing. (Martin, 2003).

Kondisi ini juga menciptakan hegemoni pengusaha besar terhadap usaha kecil, karena pengusaha besar relatif lebih siap bersaing dalam liberalisasi ekonomi global. Keterbukaan yang dibangun kaum kapitalis dengan semangat liberalisasi ekonomi, akan sangat merugikan bagi pelaku ekonomi yang kurang mampu bersaing

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baswir, Revrison, 2005. Peta Masalah dan Kondisi Perekonomian Indonesia” makalah pada Diskusi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: PP Aisyiah
- Cavanagh, Jon, et.al, 2002, Alternatives to Economic Globalization, San Francisco: Berret-Koehler.
- Gilpin, Robert, 2002, The Chalange of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century, Oxford: Princeton University Press.
- Elwood, Wayne, 2001, No-Nonsense Guide to Globalization, Oxford: New International Publications.
- Hamid, Edy Suandi dan Anto, Hendrie, 2000, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III. Yogyakarta: UII Press
- Hamid, Edy Suandi . 2004. Globalisasi, Persaingan Bebas, dan Ekonomika Etik”, Makalah Seminar In Memoriam Prof. Ace Partadiredja. Yogyakarta: UII
- Khor, Martin, 2003, Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan (Globalization and the South: Some Critical Issues), Yogyakarta: Cindelar.
- Merrett, David, 2005, Global Management Issues, Melbourne: University of Melbourne.
- Mubiyarto. 1993. Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mubyarto, 2002, “Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi”, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat. Th 1 No. 7/2002 . Yogyakarta: UGM
- Mubyarto, 2005, “Lima Puluh Tahun Konferensi Asia Afrika: Penjajahan Kembali Ekonomi Indonesia” Makalah dalam Seminar Internasional Bandung 2005, Yogyakarta: UGM
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk. 2021. Sistem Ekonomi Pancasila. Bandung: Widina Bhakti.
- Pieterse, Jan Nederveen, 2001, “Shaping Globalization” dalam Jan Nederveen Pieterse (ed) Global Futures: Shaping Globaliztion. London: Zed Books.
- Rodrik, Dani, 2002, Has Globalization Gone Too Far?. Washington: Institute for International Economics.
- Stiglitz, Joseph E., 2002, Globalization and Its Discontents. New York: Norton Company
- Swasono, Sri-Edi. 2005. Daulat-Rakyat: Rakyat versus Daulat-Pasar, Yogyakarta: PUSTEP UGM.
- Subiyakti Tjakrawerdya. 2019. Sistem Ekonomi Pancasila. Depok : Rajawali Press, 2019

Ucapan terima kasih disertai doa saya sampaikan kepada senior saya di FEB, Prof. Dr. H. Ady Sunjoto, M.Si, almarhum, yang selalu mendorong dan memberi motivasi untuk meningkatkan kualitas akademik saya. Dan kepada Prof. Dr. Bambang Suratman, M.Pd, yang selalu membimbing ke arah yang lebih baik, serta Prof. H Yoyok Soesetyo, Ph.D, yang selalu menyemangati untuk meraih jenjang akademik yang terhormat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima amal baiknya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi FEB Universitas Negeri Surabaya, serta Bapak / Ibu dosen di Jurusan Pendidikan Ekonomi FEB Universitas Negeri Surabaya, yang mendukung pencapaian saya pada jenjang akademik yang terhormat ini.

Ucapan terima kasih dan doa kepada kedua orang tua saya, Almarhum Ayahanda Kumpul Purn. Soehardi dan Almarhumah Ibunda Siti Utari yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan doa dan nasehatnya. Kepada saudara-saudara kandung saya: (1) Drs. Subur Prasetyo, MM, (2) Ir. Widodo Wisnu, (3) Susito Heru, SE, (4) Ir. Handoko Haris, (5) Harjono Siswo, dan (6) dr. Wiwik Suryandari, yang selalu mendorong dalam pencapaian jenjang akademik yang terhormat ini.

Dan wabil khusus, ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Istri tercinta Lusiana, AmPd, dan ananda tersayang Dr. Yunita Puspasari, dan Kartika Fitriana, SE, MM, serta menantu saya Dr. Satyadi, Sp.PD atas motivasi dan dukungan moralnya.

Kepada hadirin, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan kesabarannya mendengarkan pidato pengukuhan Guru Besar saya.

***Wa billahi taufik wal hidayah, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

dan membuka peluang yang lebar bagi pengusaha besar untuk menguasai yang kecil. Kondisi ini perlu campur tangan Pemerintah untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada yang lemah untuk melindungi hegemoni dari pengusaha besar, sehingga interaksi keterbukaan ekonomi terlaksana secara adil dan tidak merugikan satu pihak.

Dalam menghadapi derap liberalisasi ekonomi, perlu bersikap realistis bahwa arus globalisasi tidak mungkin terbendung ataupun menghindarinya. Globalisasi di berbagai aspek kehidupan akan terus berjalan tanpa ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Untuk menyesuaikan dengan globalisasi ekonomi tersebut perlu meningkatkan kemampuan dan daya saing ekonomi secara terus menerus mensinergikan potensi-potensi lokal dan nasional untuk bersaing di percaturan global. Upaya lain yaitu dengan menggalang kerjasama dan mengajak negara-negara lain yang bersikap sama untuk menolak prinsip kerjasama ekonomi yang tidak adil dan merugikan satu pihak, yang dilakukan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan global. Perjuangan untuk menciptakan rumusan kerjasama yang adil dan tidak merugikan kepentingan nasional, perlu selalu diupayakan dalam mengantisipasi kerjasama ekonomi global.

Kecenderungan globalisasi ekonomi yang terjadi dewasa ini perlu dicermati dan kerjasama ekonomi perlu diusahakan saling menguntungkan dan menghargai satu sama lain. Era globalisasi ekonomi yang memaksakan liberalisasi, perlu dikategorikan sebagai bentuk neoliberalisme. Apalagi kekuatan ekonomi menjadi alat pemaksaan negara kuat terhadap negara lain dalam ideologi politiknya. Demikian juga dalam proses globalisasi, negara kuat seringkali memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi dunia untuk mendukung kebijakannya, yang berdampak pada keuntungan terus mengalir ke negara-negara maju. Walaupun dengan semangat kerjasama yang saling menguntungkan, seringkali terjadi yang lebih diuntungkan tetap saja pada pihak-pihak negara industri maju yang memang sudah terbiasa dengan praktik-praktik persaingan bebas dalam perekonomiannya, sebagai derivasi dari ideologi dan falsafah hidupnya yang liberal.

Globalisasi ekonomi penuh dengan muatan ideologis liberal-kapitalis, dengan wajah yang menyerupai derivasi dari ideologi tersebut. Globalisasi yang membawa ideologi liberalistik ini jelas tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, sehingga kita perlu hati-hati dalam menyikapinya. Demikian juga dalam menyikapi praktik-

praktik globalisasi ekonomi, perlu ditinjau dari pandangan ideologi Pancasila yang pada hakekatnya mengedepankan kepentingan masyarakat.

J.M. Keynes pada tahun 1936 seorang diri membuat revolusi dengan menunjukkan bahwa ilmu ekonomi yang dipelajari dan dikembangkan selama 150 tahun sejak 1776 adalah ilmu yang keliru yang harus ditinggalkan jika sistem kapitalisme ingin selamat.(Mubyarto, 2005). Hal mendasar yang paling jelas kekeliruannya adalah kepercayaan selalu terjadinya keseimbangan (equilibrium) antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) sebagaimana yang dipahami sebagai hukum alam. Ilmu Ekonomi di Indonesia, seperti halnya di banyak negara berkembang yang lain, juga tidak relevan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia sejak pertengahan tahun limapuluhan adalah ilmu yang mengajarkan keserakahan perorangan atas alam benda, yang mengajarkan sifat-sifat egoisme pada setiap orang dan menafikan asas semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Konsep Ekonomi Pancasila bertolak belakang dengan ilmu ekonomi Neoklasik ortodok yang kini diajarkan di perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah lanjutan, yang mengasumsikan rumah tangga atau masyarakat semata-mata sebagai konsumen yang hanya bertindak sebagai kumpulan “tukang belanja” dan di pihak lain produsen yaitu dunia usaha yang pekerjaannya sangat mulia yaitu memproduksi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat/masyarakat dianggap selalu merupakan misi dunia usaha. Maka investor selalu dianggap “dewa penyelamat” yang tugasnya “memakmurkan masyarakat” atau membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja yang membutuhkannya.

Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang bertugas mengemban amanat penderitaan rakyat harus berdiri di baris terdepan merombak total ajaran ilmu ekonomi Neoklasik ortodok yang sudah diterima sebagaimana ajaran agama. Padahal aliran neoklasik ortodok ini sangat merugikan masyarakat banyak karena mengajarkan keserakahan perorangan atas alam benda. Ilmu Ekonomi Pancasila adalah ilmu tentang ekonomi moral yang sesuai nilai dan moralitas bangsa Indonesia.

2. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan kebijakan perekonomian yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, karena akan efektif dalam mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan kemakmuran. Namun Sistem Ekonomi Pancasila masih belum memasyarakat dan dapat diterima oleh sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia, karena ketidak-tahuan terhadap sistem-sistem perekonomian.
3. Perlu ada gerakan revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila secara lebih sistematis dan terencana sehingga sistem ini bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Revitalisasi bisa diterapkan melalui berbagai kebijakan Pemerintah terhadap sistem perekonomian yang berpihak kepada masyarakat dengan tidak mengurangi demokratisasi dibidang ekonomi.
4. Revitalisasi sistem ekonomi Pancasila perlu diupayakan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi ekonomi yang berpihak kepada kapitalis dan mengurangi kesenjangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **Hadirin Yang saya hormati,**

Pada bagian akhir pidato pengukuhan ini, izinkanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa terhadap karir akademik saya di Universitas Negeri Surabaya. Kepada Pemerintah Republik IndonesiaI saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan tertinggi dosen yaitu Guru Besar. Dengan ikhtiar dan doa, saya akan berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas profesionalisme saya sebagai guru besar.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Senat FEB dan Dekan FEB Univeristas Negeri Surabaya, Senat Universitas Negeri Surabaya, Komisi Guru Besar, dan Rektor Universitas Negeri Surabaya yang telah menyetujui dan meneruskan pengusulan jabatan Guru Besar saya kepada Menteri. Kepada para Wakil Dekan FEB, para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan FEB Universitas Negeri Surabaya, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya yang baik sehingga saya bisa meraih jenjang akademik yang terhormat ini.

Untuk melaksanakan agenda-agenda tersebut, para pemimpin negara-negara berkembang tentu perlu membekali diri dengan kemauan politik yang kuat. Bersamaan dengan itu, mereka juga dituntut untuk terus menggalang kekuatan dan mempererat hubungan antar sesama negara berkembang se-dunia. Posisi tawar negara-negara berkembang perlu ditingkatkan untuk menghadapi oligarki negara-negara maju. Upaya ini diharapkan mampu mencegah para pemimpin negara-negara maju untuk terus melaju dengan agenda-agenda ekonomi neoliberal mereka. Derap globalisasi ekonomi yang hakikatnya merupakan praktik-praktik imperialisme neoliberal negara-negara maju memang harus secepatnya dihentikan.

Ekonomi Pancasila perlu direvitalisasi untuk menunjang pembangunan nasional bangsa Indonesia. Konsep ekonomi Pancasila perlu disosialisasikan secara berkelanjutan agar lebih memasyarakat di kalangan pelaku ekonomi maupun seluruh bangsa Indonesia. Konsep ekonomi Pancasila perlu diusahakan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kebijakan ini perlu kemauan politik Pemerintah agar konsep ekonomi Pancasila bisa dipahami masyarakat pada umumnya. Sebab pada umumnya pakar ekonomi juga terperangkap oleh “suatu keyakinan” bahwa ilmu ekonomi bersifat bebas nilai (value free) dan menjangad (universal). Keterbentukan ilmu ekonomi dipercayai tidak dipengaruhi oleh saat ketika dan tempat dimana ia lahir. Akibatnya, konsep Ekonomi Pancasila sukar diterima oleh para ekonom Indonesia sendiri, karena konsep keilmuan ekonomi yang khusus semacam Ekonomi Pancasila dipandang mengada-ada. Namun pandangan ini perlu diminimalisir sehingga penerapan konsep ekonomi Pancasila bisa menjadi dasar bagi sistem perekonomian di Indonesia.

### **Hadirin yang saya hormati, Simpulan**

Dari paparan di atas bisa dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi sangat merugikan sebagian besar rakyat Indonesia karena membuka lebar pintu persaingan bebas sehingga sangat menguntungkan negara maju yang relatif siap untuk bersaing karena didukung oleh modal finansial dan teknologi yang modern.

Ideologi Pancasila disepakati sebagai pandangan hidup bangsa sehingga perilaku sehari-hari, termasuk praktik-praktik kegiatan ekonomi didasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa. Praktik-praktik kegiatan ekonomi perlu mencerminkan norma yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Praktik kegiatan ekonomi perlu penerapan nilai-nilai Ketuhanan, yang manusiawi, nasionalistik, dan kerakyatan, serta berkeadilan sosial. Fakta empiriknya, banyak kegiatan ekonomi dalam era globalisasi ini yang menyimpang dari norma-norma ideologi Bangsa Indonesia.

Globalisasi ekonomi sering melindas kepentingan masyarakat banyak, terutama kelompok bawah yang terabaikan peran dan kepentingannya, seperti kaum petani, buruh dan pekerja kelas bawah yang kepentingannya sering dikorbankan. Ulah kaum kapitalis yang mengandalkan padat modal dan teknologi seringkali mengakibatkan para buruh kehilangan pekerjaan, harga komoditi strategis ditentukan sendiri, sehingga kedaulatan ekonomi bangsa berada di tangan negara lain atau lembaga internasional. Mekanisme perekonomian global diskenario dan dikendalikan oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional yang tentu saja membawa misi kepentingan negara-negara maju dalam semangat korporasi global.

Betapa naifnya, di sebuah negara yang masih berkembang seperti Indonesia dengan daya saing yang masih rendah dan kemiskinan masih relatif tinggi, sertamerta menyokong praktik-praktik kegiatan ekonomi global yang memberi kontribusi pada ketimpangan dan ketidak-adilan ekonomi dunia. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak menambah lebar kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang. Sistem kebijakan ekonomi perlu dilandaskan pada ideologi Pancasila, dengan nilai dan normanya yang tumbuh berkembang di masyarakat Indonesia. Kebijakan sistem ekonomi tersebut dikenal dengan Sistem Ekonomi Pancasila yang praktik pelaksanaannya lebih berpihak kepada rakyat atau perekonomian yang berlandaskan kerakyatan, dengan kebijakan yang berusaha menanggulangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan untuk menyejahterakan rakyat berdasarkan etika Pancasila (Mubyarto, 2002).

Upaya mewujudkan sistem ekonomi Pancasila tentu saja tidak mudah, karena berhadapan dengan kelompok pemodal dengan teknologi yang relatif lebih modern. Apalagi semakin merebaknya sikap individualistik dan faham kapitalisme-liberalisme atau sering

dikenal dengan neo-liberalisme pada kalangan pengusaha nasional, sehingga muncul sifat keserakahan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dalam usaha dan kegiatan perekonomiannya. Berkembangnya sifat individualistik yang mengalir terbawa arus globalisasi pada kalangan masyarakat Indonesia yang dikonotasikan sebagai gaya hidup modern, merupakan tantangan yang sangat berat untuk mewujudkan ekonomi Pancasila yang berbasis kerakyatan.

**Hadirin yang saya hormati,**

### **Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Era Globalisasi**

Bangsa Indonesia perlu menyikapi secara hati-hati terhadap fenomena globalisasi yang cenderung merugikan perekonomian nasional. Karena globalisasi ekonomi cenderung menguntungkan para industrialis yang bermodal besar maupun segelintir pengusaha nasional yang diuntungkan oleh mekanisme persaingan bebas. Globalisasi telah dikendalikan oleh kaum kapital dari negara industri dan bekerjasama dengan agen utamanya di negara-negara berkembang dalam upaya penumpukan kapital. Bahkan menurut Baswir (2005) di negara majupun sering muncul sikap-sikap yang menentang praktik liberalisasi ekonomi, terutama dari kalangan bawah yang pasti akan merasakan dampaknya. Banyak organisasi swadaya masyarakat dunia yang kemudian bergabung dalam komunitas World Social Forum, yang menunjukkan sikap menentang pada kebijakan ekonomi global yang dikendalikan oleh trio lembaga ekonomi global, yaitu: World Trade Organization (WTO), Internasional Moneter Fund (IMF) dan World Bank. Ketiga lembaga ekonomi global ini terus berusaha untuk mengendalikan ekonomi dunia, dengan kebijakan yang bertumpu pada semangat persaingan bebas yang cenderung menguntungkan kaum kapitalis yang relatif memiliki daya saing tinggi, baik modal maupun teknologi.

Fenomena kegiatan perekonomian di Indonesia, dalam menyikapi sistem ekonomi konvensional yang mengandalkan mekanisme pasar dengan tumpuan persaingan bebas, perlu dimunculkan wacana Sistem Ekonomi Pancasila. Bahkan sejak tahun 1980 telah mulai dimasyarakatkan konsep Ekonomi Pancasila. Sosialisasi konsep Ekonomi Pancasila masih belum sebagaimana yang diharapkan. Penerapan ekonomi kerakyatan yang mendasarkan pada nilai dan norma Pancasila masih banyak menghadapi hambatan, terutama oleh kalangan elit ekonomi dan trend gaya hidup modern

yang cenderung bersikap individualistik seperti yang dibawa arus globalisasi.

Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan kemakmuran demi kesejahteraan yang berkeadilan sosial perlu direvitalisasi perannya sehingga tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia bisa terwujud. Berbagai hambatan, rintangan dan tantangan yang menghadang penerapan Sistem Ekonomi Pancasila harus segera diatasi. Sudah selayaknya sistem ekonomi Pancasila bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan Pemerintah harus bersifat sebagai upaya untuk revitalisasi sistem ekonomi Pancasila.

Revitalisasi sistem ekonomi Pancasila perlu diupayakan secara berkelanjutan dengan kebijakan yang konsisten. Kebijakan internal dalam negeri, Pemerintah Indonesia perlu menerapkan berbagai kebijakan perekonomian nasional yang berbasis kerakyatan dengan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Hal ini untuk mengantisipasi dampak bergulirnya ekonomi global yang semakin merebak ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan pekonomian nasional harus selalu didasarkan pada nilai dan norma Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara. Kegiatan ekonomi yang bersifat padat karya dan berasas kekeluargaan, perlu diutamakan.

Dalam kebijakan keluar, Pemerintah RI yang dengan segala kemampuan dan pengaruhnya, perlu menggalang kerjasama dengan negara-negara senasib untuk memperkuat persatuan dalam menanggulangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang yang semakin lebar. Upaya ini selaras dengan Forum Globalisasi Internasional (1999), yang beberapa agendanya mendesak untuk dilakukan reformasi dalam rangka internasionalisasi, yaitu: pertama, pembentukan lembaga-lembaga internasional baru untuk: (1) mencegah penularan penyakit, konflik, dan kerusakan lingkungan internasional; dan (2) menetapkan norma internasional mengenai hak-hak dan standar-standar yang sebagian besar akan diterapkan pada tingkat nasional. Kedua, penataan ulang (reformasi) tata keuangan internasional. Ketiga, penataan ulang tata kelembagaan Bank Dunia dan bank-bank regional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), yang memiliki fungsi sejenis. Dan keempat, penataan ulang organisasi Perdagangan Dunia (WTO).